

POLEMIK BUDAYA DAN CINTA : DISKRIMINASI PENDAMPING HIDUP PEREMPUAN BERKASTA TINGGI

Muh. Adnan Malewa

Program Studi Magister Kajian Budaya, Universitas Udayana

Abstrak

Perempuan berkasta tinggi di Bali kadang tidak dianggap sebagai subaltern, karena mereka memiliki kapital ekonomi, simbolis dan sosial yang membedakan dirinya dengan perempuan berkasta Sudra. Pada kenyataannya perempuan berkasta tinggi, mempunyai masalah yang kompleks dalam pemilihan pasangan hidupnya, dikarenakan pendisiplinan kapital budaya yang lahir dalam bentuk tradisi. Produksi tradisi yang menjadi kebenaran tunggal tidak lepas dari buah pengetahuan dalam kontrol kuasa, sehingga mengikat mereka dalam lingkaran kuasa itu sendiri. Mereka berada di ruang dimana budaya dan cinta menjadi pilihan dilematis. Memilih pasangan hidup sesuai dengan tradisi kasta, atau menjadi bagian modernisasi untuk bebas memilih dengan kehendaknya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi etnografi konvensional dengan sumber kualitatif. Narasumber kunci dalam penelitian ini akan terfokus pada perempuan berkasta tinggi. Teori relasi kuasa dan pengetahuan Michael Foucault menjadi teori utama, dalam melihat pendisiplinan dan ikatan kuasa dan pengetahuan dalam tradisi masyarakat Bali. Disandingkan dengan teori strukturasi Pierre Bourdieu untuk melihat ambivalensi kapital budaya yang diasosiasikan dalam tradisi pilihan pendamping hidup Bali. Analisa ini akan menghasilkan sudut pandang baru dalam kajian gender, dalam melihat manipulasi kuasa pada tradisi Bali yang mengekang dominasi kapital dalam membentuk perempuan dengan modalitas kekuasaan sebagai subaltern.

Kata Kunci: Kasta, Subaltern, Feminisme, Bali

Abstract

High-caste women in Bali are sometimes not considered subalterns, because they have economic, symbolic and social capital that distinguishes them from Sudra-caste women. In fact, women of high caste have complex problems in choosing their life partners, due to disciplining of cultural capital in the form of tradition. The production of traditions which become a single truth and cannot be separated from control of knowledge and power, thus binding them to the circle of power itself. They are in a space where Culture and Love are the dilemma. Choosing a marriage partner according to caste tradition, or becoming part of modernization to be free to choose with her will. In this research, the writer uses conventional ethnographic methodology with qualitative sources. Key informants in this research will focus on high-caste women. Theory of Power and knowledge Relations from Foucault became the main theory, for looking at the discipline and bond of power and knowledge in the traditions of the Balinese. Assisted by Bourdieu's structuration theory to see the ambivalence of cultural capital that associated in the tradition of Balinese life companion choice. This analysis will produce a new perspective study of gender, to seeing the manipulation of power inside Balinese tradition which curbs the dominance of capital in shaping women with power modality as subaltern.

Keywords: Caste, Subaltern, Feminism, Bali

PENDAHULUAN

Sistem kasta dalam ajaran agama Hindu Bali adalah sistem pengelompokan identitas masyarakat berdasarkan keahliannya. Empat kasta dalam agama Hindu berdasarkan urutan dan perannya adalah Brāhmana untuk ahli agama, Kesatria untuk yang berkedudukan di pemerintahan, Waisya untuk pedagang, dan Sudra untuk pembantu Brahmana, Ksatriya, dan Waisya.. Namun dalam perjalanannya sistem ini, berubah makna dan substansinya menjadi sistem kelas sosial (Kembar, 2007). Pergeseran makna yang terjadi didasari dari campur tangan kolonial Belanda dalam mempertahankan monopolinya di Bali. Lewat sistem kasta yang permanen atau diturunkan lewat darah, pemerintah kolonial akan lebih mudah untuk memiliki kontrol terhadap keluarga yang sama.

Perubahan dalam tatanan politik tersebut, memberi dampak besar terhadap status perempuan sebagai masyarakat kelas dua pada setiap kasta, khususnya pada kasus pemilihan pendamping hidup. Oka Rusmini dalam novelnya *Tarian Bumi*, menjelaskan secara detail bagaimana tradisi ini merenggut kemerdekaan perempuan Bali, dan membentuk mereka sebagai subaltern. Walau begitu subaltern yang ditawarkan penulis tidak bisa disamakan dengan yang digunakan Gayatri Spivak dalam menggeneralisir perempuan di India dalam esainya *Can The Subaltern Speak?*. Dikarenakan setiap kasta di Bali mempunyai kriteria ketertindasannya tersendiri. Untuk itu perlu dilihat secara detail posisi kasta perempuan tersebut, untuk dapat melihat ketertindasan yang dialami berdasar mode pendisiplinannya.

Pada studi kasus pemilihan pendamping hidup perempuan berkasta tinggi, penulis menemukan perbedaan yang cukup aneh, terlebih bila dibantu konsep kapital Pierre Bourdieu, sebagai modalitas kekuasaan. Bila membandingkan kapital yang dimiliki perempuan berkasta tinggi dan rendah, maka perempuan berkasta tinggi secara hierarkis menduduki kelas dominan yang dapat mendefinisikan dan menentukan budaya (Haryatmoko, 2016). Namun pada realitasnya, perempuan berkasta tinggi mengalami ketertindasan yang tidak dialami perempuan berkasta rendah, yang mana perempuan berkasta tinggi diharuskan memilih pasangan hidupnya dengan kasta yang setara atau lebih tinggi, sedangkan perempuan berkasta rendah mempunyai pilihan bebas untuk memilih pendamping hidup yang mereka cintai.

Ambivalensi yang terjadi, kemudian menuntun penulis pada kapital budaya yang terdefiniskan oleh kode budaya atau tradisi, yang tidak dimiliki sepenuhnya perempuan berkasta tinggi, dikarenakan adanya kuasa yang menormalisir melalui pendisiplinan, yang melahirkan kebenaran baru dan mengerucutkan pemahaman siapa yang pantas dan tidak pantas untuk menjadi pendamping perempuan berkasta tinggi (Foucault, 1997).

Bagi perempuan berkasta tinggi yang berada dalam modernisasi, ketentuan ini menjadi pilihan dilematis. Di satu sisi, mereka ingin bebas untuk memilih pasangan hidupnya sebagaimana modernisasi menuntun mereka, namun di sisi lain mereka harus berhadapan dengan tradisi yang masih mengikat mereka. Sehingga membawa mereka dalam arena di mana kapital budaya yang berasosiasi sebagai tradisi harus berhadapan dengan kapital lain. Namun malangnya, kapital ini tidak dapat dinegosiasikan atau dikonversi, sehingga hanya terdapat satu pilihan, mengorbankan cinta atau budaya mereka.

KONSEP DAN TEORI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berbeda pada pengertian umumnya, *pertama*, konsep perempuan berkasta tinggi dan perempuan berkasta rendah.

Dalam agama Hindu pada umumnya terdapat empat kasta, Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Sudra. Namun setelah pergeseran makna oleh pemerintah kolonial, istilah kasta tinggi diasosiasikan dengan Brahmana dan Kesatria, sedangkan kasta rendah berasosiasi dengan Waisya dan Sudra. Kemudian konsep dominasi, penulis mengartikan konsep ini sebagai penguasaan langsung keluarga berkasta tinggi lewat tradisi yang menekan subyek atau perempuan berkasta tinggi untuk mengikuti nilai dan moral dari tradisi keluarga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, teori relasi pengetahuan dan kuasa Michel Foucault. Menurut Foucault pengetahuan dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan suatu bentuk wujud pengetahuan, begitupun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Pengetahuan yang digunakan kuasa dalam membentuk kebenaran baru sebagai kapital budaya yang berasosiasi dengan tradisi dalam pendisiplinan perempuan berkasta tinggi memberikan gambaran bagaimana kuasa bermain sebagai strategi yang saling mengikat kepentingan-kepentingan pemilik kekuasaan.

Teori stukturasi dari Pierre Bourdieu, dapat menggambarkan bagaimana kuasa membentuk habitus yang lahir dari tradisi pemilihan pendamping hidup perempuan berkasta tinggi Bali. Perempuan berkasta tinggi menjadi properti kekuasaan yang membentuk kapital budaya untuk penguasa, sehingga lahirnya arena perjuangan, yang di mana perempuan berkasta tinggi mengkonversi kapital simbolis, kapital sosial dan kapital ekonomi hanya untuk mendapatkan kapital budaya. Pengorbanan ini dilakukan agar dapat memilih pendamping hidupnya sesuai dengan cinta yang diyakininya.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi konvensional yang mengambil lokasi di propinsi Bali. Pemilihan lokasi didasarkan pada tradisi masyarakat Bali, yang masih menerapkan sistem kasta pada pemilihan pendamping hidup perempuan berkasta tinggi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa wawancara langsung dengan perempuan berkasta tinggi, keluarga dan budayawan Bali.

Penentuan informan dalam penelitian ini, berdasar pada kompetensi untuk memberikan informasi. Adapun pembagainya yaitu informan kunci dan informan ahli. Informasi kunci adalah perempuan berkasta tinggi sebagai obyek penelitian, dan informan ahli adalah tokoh budaya Bali sebagai sumber skunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) teknik observasi penelitian menggunakan observasi langsung melalui pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan tradisi yang membentuk perempuan berkasta tinggi dalam kesehariannya, tradisi *nyerod* atau perkawinan perempuan berkasta tinggi dengan laki-laki berkasta rendah, hingga hukuman terhadap penyimpangan dari perkawinan terlarang. (2) teknik wawancara dilakukan secara langsung kepada informan. Untuk studi dokumentasi berupa pengambilan gambar langsung tradisi Bali yang mencakup penelitian.

HASIL ANALISIS

Perempuan yang menjadi subaltern dan kehilangan kemerdekaannya, telah banyak ditulis dalam kajian feminisme. Salah satu yang paling monumental yaitu tulisan essay Gayatri Spivak dengan judul *Can The Subalter Speak?*. Dalam tulisan ini, Spivak memberikan gambaran umum perempuan India yang termarginalisasi oleh tradisi Hindu India dengan melihat rangkaian kuasa dalam pandangan Foucault, dan Deleuze. Namun dalam tulisan Spivak, pembahasan tentang perempuan sebagai subaltern lebih umum dengan kajian

poststrukturalis. Spivak tidak melihat kuasa yang bermain dalam pembagian kasta yang ikut mengikat tradisi tertentu dalam peran sosial perempuan.

Tulisan lain yang juga terkait, terdapat dalam tulisan *Perempuan Bali dalam Pergulatan Gender* oleh Ni Nyoman Rahmawati, dan *Perempuan Gianyar dan Belunggu Ranah Publik dan Privat* oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel. Kedua tulisan ini mampu memberikan gambaran umum tradisi yang mengikat perempuan dengan analisis gender untuk mendongkrak status perempuan Bali. Namun tulisan tersebut terlalu mengeneralisasi keadaan perempuan Bali dengan analisis positivistik yang menggunakan *grand narrative* (Lyotard dalam Lubis, 2003), sehingga titik berat postmodernisme yang dilihat Francois Lyotard dalam analisis narasi-narasi kecil tidak tergambar dalam kedua tulisan.

Untuk itu penulis mencoba melihat dengan pandangan berbeda, sebagaimana kajian budaya mencoba menganalisa proses dan relasi di dalamnya dengan bebas nilai. Untuk itu penulis membagi dua pembahasan pokok yang menjadi acuan penulis, *pertama*, perempuan berkasta tinggi, buah simbol kuasa, yang mana akan menganalisa dengan metodologi genealogi dari sejarah, tradisi dan pembentukan pengetahuan oleh kuasa yang menjadi kebenaran tunggal. *Kedua*, mempertahankan kapital budaya, melestarikan budaya dan mempertahankan kuasa, penulis menggunakan teori poststrukturalis generative, Pierre Bourdieu yang melihat bagaimana pembentukan habitus yang menjadi bagian kapital budaya dalam arena perjuangan kasta.

Perempuan Berkasta Tinggi, Buah Simbol Kuasa

Diskriminasi pada perempuan berkasta tinggi di Bali terhadap pilihan pendamping hidup sebagai tradisi Bali, memberikan gambaran besar pengaruh kasta yang melekat pada perempuan Bali, dapat memberikan efek ketertindasan yang diukur dari kastanya. Semakin tinggi kastanya, semakin dikontrol dan dikuasai hidupnya. Semakin dikontrol hidupnya, maka sempit juga pilihannya dalam menentukan hidupnya. Menjadikan kasta sebagai penjara tak berjeruji, yang menyempitkan pilihan seseorang untuk mendapat kemerdekaannya sebagai manusia. Namun pernahkah kita melihat kebelakang dan bertanya dari mana simbol kasta itu, mengapa perempuan menjadi masyarakat kelas dua, dan mengapa wanita berkasta tinggi hanya bisa menikah dengan laki-laki berkasta sama atau lebih tinggi. Pertanyaan itu tidak akan pernah hinggap di kepala kita, karena kita selalu membungkus kebenaran yang ingin kita ketahui di bawah pengaruh kuasa. Hingga hanya ada kebenaran tunggal dari kekuasaan, yang kita harus terima. Karena kebenaran tidak berada di luar kekuasaan, akan tetapi berada di dalam kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan adalah kebenaran (Foucault, 1980: 133).

Kebenaran yang berada dalam kekuasaan dapat ditemukan melalui fakta historis pembentukannya. Maka untuk melihat kekuasaan sebagai kebenaran pada sistem kasta di Bali akan dimulai dengan aturan kolonial Belanda dengan judul stb. 1929, No 226, yang berisi pembentukan delapan kerajaan di Bali yang dipimpin orang pribumi atau *Bestuurder*. Delapan Kerajaan yaitu: Bangli, Gianyar, Karangasem, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Badung, dan Klungkung. Dengan lahirnya *Bestuurder*, sistem kasta kemudian digeser maknanya menjadi sistem kelas sosial melalui gelar yang merujuk pada istiadat setiap daerah. Sehingga lahirlah gelar *I Dewa Agung*, *Cokorda*, dan *Anak Agung*, yang diwariskan melalui garis keturunan kekuasaan Bali hingga saat ini.

Dengan manipulasi dari kolonial, kasta yang awalnya sebagai identitas bertransformasi menjadi kelas sosial, yang mana ikut menggeser status perempuan dari setara menjadi dikuasai. Sekitar tahun 915-1021 terdapat 38 Raja di Bali, dan 4

diantaranya adalah perempuan. Fakta sejarah ini setidaknya memberikan gambaran pembagian peran domestik dan publik belum berlaku di Bali. Secara kontekstual aturan pembentukan *Bestuurder* memang tidak menyentuh status perempuan secara langsung, namun pada praxis-nya dengan dorongan variabel-variabel kuasa yang berasal dari kolonial dan lingkaran kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki, terbentuklah nilai dan moral dalam bentuk tradisi yang mendisiplinkan tubuh perempuan untuk dikuasai dan dijadikan properti untuk kepentingan kekuasaan. Disiplin tidak diidentikkan dengan institusi atau aparat; ia adalah suatu tipe kekuasaan, suatu modalitas untuk menjalankan kekuasaan, yang terdiri dari keseluruhan sarana, teknik, prosedur, tingkatan penerapan, sasaran-sasaran; ia merupakan fisik atau anatomi kekuasaan, suatu teknologi. Dan ia dapat dijamin oleh institusi-institusi yang terspesialisasi atau institusi-institusi dengan tujuan tertentu (Haryatmoko. 2014 : 16).

Dengan mengendapkan peran perempuan sebagai objek yang dikuasai dalam catatan sejarah, mengendapkan pula kebenaran tersebut dalam pandangan umum. Kebenaran yang lahir dari relasi kuasa dan pengetahuan inilah yang dijabarkan Julia Kristeva sebagai posisi psikis pra-konseptual, melalui tahap pengalaman kronologis yang dipertahankan di alam bawah sadar sebagai situs marginalitas ke simbolik. Yang pada dasarnya membagi maskulin dan feminis sebagai persepsi marginalitas yang disimbolkan dalam perbedaan bentuk tubuh hingga perilaku. Sehingga ungkapan “anak mu perempuan yaa”, ketika anak perempuan baru lahir, menjadi kalimat yang tidak dikonotasikan sebagai diskriminasi. Karena secara tradisi Bali yang tersimbolkan, anak laki-laki jauh lebih agung dilahirkan daripada perempuan yang hanya menjadi masyarakat kelas dua.

Tersimbolkannya perempuan sebagai masyarakat kelas dua, ikut mengikat perempuan dalam dominasi dan hegemoni masyarakatnya sendiri, yang tidak dikontrol menurut kekuasaan yang sifatnya fisik, tetapi dikontrol, diatur, dan didisiplinkan lewat wacana dalam bentuk tradisi. Sehingga semua tindakannya diawasi bukan hanya oleh laki-laki tapi juga perempuan, bahkan oleh dirinya sendiri, sehingga lingkaran *social pressure* inilah, yang kemudian menggerakkan perempuan Bali, layaknya wacana dalam tradisi Bali. Maka perempuan Bali yang berada di luar dari cakupan tradisi tersebut, dianggap perempuan Bali yang tidak normal atau gila. Contoh sederhananya, dapat dilihat pada arena sabung ayam di Bali, tidak pernah ditemukan perempuan Bali ikut melakukan sabung ayam, dikarenakan wilayah tersebut, hanya dimiliki laki-laki. Maka bila ada perempuan Bali melakukannya, perempuan ini dianggap tidak normal, atau gila. Inilah yang disebut Foucault sebagai bentukan pengetahuan yang dilegitimasi oleh lingkaran strategi subordinat dan kekuasaan sebagai kuasa yang tidak berobjek (Foucault, 2002). Kuasa inilah yang dilegitimasi bersama masyarakat Bali dalam membentuk tradisinya, dan mendisiplinkan tubuh-tubuh perempuan Bali. Namun perlu dicatat, walau pengaruh aturan kolonial mempengaruhi pendisiplinan perempuan secara umum, tetapi yang lebih besar mendapat dampaknya adalah perempuan yang berada dalam lingkaran kekuasaan atau perempuan berkasta tinggi. Karena mereka adalah tradisi dan simbol kekuasaan yang menjadi *role model* dari budaya tinggi yang akan ditiru budaya rendah. Maka pengetahuan yang lahir dalam membentuk pendisiplinan yang diterapkan kuasa juga semakin mengekang hak-haknya sebagai manusia merdeka. Sehingga akan keliru bila kita mengeneralisir marginalisasi gender terhadap perempuan Bali, atau beranggapan perempuan berkasta tinggi mempunyai kehidupan lebih baik dari pada perempuan berkasta rendah.

Pada dasarnya pengekangan hak perempuan berkasta tinggi, tidak lepas dari perannya sebagai pelestari budaya tinggi untuk mempertahankan status sosial kastanya.

Peran ini lebih spesifik direalisasikan dengan aturan pemilihan pasangan hidup, yang diperuntukan untuk menghadirkan keturunan murni berkasta tinggi. Malangnya, tanggung jawab ini hanya diperankan perempuan berkasta tinggi, tidak untuk laki-laki berkasta tinggi yang bebas memilih pasangannya, dan tidak pula untuk perempuan berkasta rendah yang mempunyai kebebasan yang sama seperti laki-laki berkasta tinggi. Untuk itu memilih pasangan secara bebas bagi perempuan berkasta tinggi adalah bentuk kegagalan moral, yang faktanya disembunyikan dan dipaksakan seolah-olah tidak datang dari subyek tertentu, karena kriteria keilmiahannya seakan-akan mandiri.

Lalu dari mana pengetahuan ini terbentuk?, Bila merujuk pada website *komangputra.com* bentukan pengetahuan yang dilegitimasi kuasa lahir dari tradisi penguasa Bali terdahulu yang menganggap persatuan antara perempuan berkasta tinggi dan laki-laki berkasta rendah sebagai bentuk penentangan hukum alam, karena air mani laki-laki berkasta lebih rendah dialirkan ke atas melalui ovum perempuan yang kastanya lebih tinggi. Tindakan ini sama artinya dengan melangkahi kepala para bangsawan Bali atau lebih dikenal di masyarakat Bali dengan sebutan “Asu Pundung dan Alangkahi Karang Hulu” (Anonim, 2016). Terlihat jelas bahwa pengetahuan yang disisipkan penguasa Bali terdahulu tidak menyiratkan keinginan personalnya, melainkan menggunakan, bahasa “penentangan hukum alam” yang diartikan Foucault sebagai subyek mandiri yang terlepas dari hasrat personal kekuasaan, yang kebenarannya dianggap mandiri. Tanpa disadari hegemoni kuasa telah memproduksi realitas, memproduksi lingkup-lingkup, objek-objek dan ritus-ritus kebenaran masyarakat Bali. Apa yang terpatrit di ide masyarakat Bali adalah wacana dari pengetahuan “penentangan hukum alam” yang disalurkan melalui hubungan sosial, di mana kembali memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku, yang dijadikan sebagai pengendalian perilaku. Keterikatan produksi ritus-ritus kebenaran inilah yang kemudian mengarahkan pola perilaku masyarakat Bali mengikuti kelas sosial kasta-nya dalam memilih pendamping hidupnya. Maka dari itu, akan sangat jarang ditemukan perempuan berkasta tinggi yang akan memilih pendamping hidup laki-laki berkasta rendah dan begitu pula sebaliknya.

Pola perilaku pemilihan pendamping hidup perempuan Bali, melalui pendisiplinan yang tumbuh dan menjadi bagian dari identitas perempuan berkasta tinggi tidak terbentuk melalui strategi kuasa yang bekerja melalui penindasan, melainkan melalui normalisasi dan regulasi, yang menghukum dan membentuk. Untuk itu penanaman indoktrinasi pendisiplinan sejak umur belia terhadap perempuan berkasta tinggi telah diterapkan sebagai pembentukan personal yang didasari atas tiga register hasrat Lacan, yaitu simbolik, imajiner dan yang real, yang dicitrakan dalam pendisiplinan untuk membangkitkan empat modus hasrat, narsistik pasif, narsistik aktif, anaklitik pasif, dan anaklitik aktif (Bracher, 1997). Dalam penjelasannya Jacques Lacan mendefinisikan empat modus hasrat dalam, *pertama*, Narsistik Pasif, di mana seseorang berhasrat menjadi obyek cinta dari orang lain, *kedua*, Narsistik Aktif, di mana seseorang berhasrat menjadi orang lain yang dicintainya, *ketiga*, Anaklitik Pasif, hasrat memiliki orang atau benda untuk mendapat kepuasan dan yang terakhir Anaklitik Aktif, hasrat ingin dimiliki oleh orang lain sebagai kepuasan. Maka tidak heran bila dalam modus pendisiplinan itu, seorang perempuan berkasta tinggi pada akhirnya mempunyai keinginan untuk menjadi putri idaman keluarga, memiliki kepuasan bila memilih pendamping hidup dengan kasta yang sama atau lebih tinggi.

Anak Agung Sri, sebagai keluarga Puri di Bali, menjelaskan
“Sejak kecil saya telah dipersiapkan dan diberitahu untuk menikah dengan laki-laki berkasta setara atau kasta lebih tinggi. Berbagai tradisi yang melingkar di keluarga besar saya seakan mengarahkan

saya kepada siapa saya saat ini. Saya tidak seperti wanita pada umumnya yang melihat fisik laki-laki atau kepribadiannya saat pandangan pertama, saya lebih memilih untuk melihat gelar nama yang menandakan kastanya,”

Pendisiplinan tubuh yang dialami Anak Agung Sri, melalui bimbingan moral dan nilai oleh orang tua, keluarga sejak ia masih usia belia hingga tumbuh menjadi dewasa. Dalam langkah praxis-nya periodisasi pendisiplinan ini, bukan bentuk cuci otak yang instan atau dilakukan dengan dominasi ala Gramsci, tetapi proses pendisiplinan panjang melalui hegemoni yang didukung oleh variabel pendisiplinan lain yang tidak nampak menyangkut pada subyek pemilihan pendamping hidup.

Adapun pendisiplinan yang ikut mempengaruhi keputusan Anak Agung Sri dalam memilih pasangannya, diterapkan dalam ritus sederhana penggunaan bahasa Bali halus dalam lingkup keluarga dan lingkaran keluarga Puri. Bahasa ini secara langsung membentuk garis antara budaya tinggi dan budaya rendah, sehingga mengikat Anak Agung Sri pada status sosial yang lebih tinggi dengan menggunakan bahasa halus Bali. Kuasa dalam bahasa yang digunakan Anak Agung Sri mengarahkan nilai dalam dirinya untuk membedakan dirinya dengan kasta di bawahnya, yang juga mendisiplinkan tubuhnya untuk berada di dalam lingkaran budaya tinggi, dengan begitu pendamping hidup yang menggunakan bahasa Bali halus menjadi solusi mempertahankan posisi kuasa yang membentuk nilai yang ada pada Anak Agung Sri. Maka oposisi biner yang menjadi nilai dalam peran bahasa ini, berkaitan erat dengan penentangan Derrida dalam teori dekonstruksi, yang mana bahasa digunakan untuk menyembunyikan hubungan dominasi atau hirerarki, yang digunakan membakukan makna, yang tidak lain sebagai upaya menetapkan diri dalam posisi tugas dan otoritas (G. Petidmange, dalam Haryatmoko 2016). Di sinilah peran kuasa dalam membentuk pengetahuan yang mengkotak-kotakan bahasa Bali dalam membentuk kebenarannya dan mempertahankan kekuasaan. Pengetahuan tak terpisahkan dari kekuasaan, bukan karena pengetahuan lekat dengan otoritas kebenaran, tetapi pengetahuan mengandung kekuasaan yang bisa mengklaim dirinya benar (Foucault, 1997).

“Agak ribet bila harus memilih pendamping hidup yang tidak menggunakan bahasa Bali halus, karena nantinya akan menjadi masalah ketersinggungan keluarga yang dianggap tidak sopan. Kalaupun bisa diajarkan menggunakan bahasa Bali halus, proses ini akan ribet”.

Pendisiplinan lain yang juga mempengaruhi keputusan Anak Agung Sri, terlihat dalam berperilaku, dalam berbusana. Dalam berperilaku, Anak Agung Sri, telah didisiplinkan dengan membedakan budaya tinggi dan budaya rendah yang hampir sama dengan strategi kuasa dalam berbahasa. Dapat dicontohkan oleh Anak Agung Sri perbedaan ini dalam lingkup yang sederhana penerimaan tamu di rumahnya, saat ada tamu dengan kasta rendah, ia harus menyuguhkan gelas berbeda dengan tamu berkasta tinggi, begitu pula sebaliknya. Pengkotak-kotakan budaya ini juga, dapat terlihat dalam berbusana. Busana dengan kain produksi khusus yang umumnya digunakan dalam kegiatan adat atau keagamaan pada kasta tinggi menyimbolkan derajatnya sebagai keturunan kerajaan. Maka tidak akan sulit untuk membedakan kasta tinggi dan rendah. Variabel-variabel pendisiplinan ini hanyalah sebagian kecil dari tradisi Bali yang mengkotak-kotakan budaya tinggi dan budaya rendah yang mengarahkan Anak Agung Sri untuk menentukan pilihan pendamping hidupnya berdasarkan kasta. Dalam tradisi-tradisi inilah kuasa membentuk pengetahuan yang saling mengikat, dalam bentuk identitas yang tidak lahir dari afirmasi diri, melainkan diungkapkan dalam hubungan keterikatan sebuah tatanan yang ditentukan oleh pengetahuan. Dari sinilah normalisasi dan terlihat normal menjadi acuan nilai dan moral setiap perempuan berkasta tinggi. Karena dengan menerima

tatanan ini mereka dianggap normal dan bermoral, dan bahkan dianggap bahagia (Deleuze, 1972).

Namun Bagi I Gusti agung Dyah yang juga salah satu penyandang kasta tinggi, tradisi ini malah mengekang dan tidak membahagiakannya, dikarenakan dengan tradisi yang mengkotak-kotakan dirinya, dia tidak bisa menjadi dirinya yang bebas, terutama dalam memilih pendamping hidupnya.

“Saya bukan orang yang bisa menentukan pilihan pendamping hidup saya berdasar kasta seseorang tapi berdasar kecocokan. Saya telah mencoba memilih pendamping hidup dengan laki-laki kasta yang sama tapi tidak mendapat kecocokan. Kemudian saya mencoba berhubungan dengan yang laki-laki yang mempunyai kecocokan dengan kasta yang lebih rendah, dan hubungan kami sejauh ini berhasil”.

Sebagai perempuan yang terikat terhadap tradisi kasta dan mengalami pendisiplinan, I Gusti Agung Dyah juga percaya akan kebebasan kehendak pada era modern, ia seakan menjadi subaltern yang lahir dari hasrat kuasa yang diartikan Sigmund Freud sebagai hasrat berdasarkan normalisasi dan subjektifitas, dari logika biner. Hasrat yang terstruktur dan digerakan oleh rangkaian tradisi dari mereka yang memiliki kekuasaan. Hasrat I Gusti Agung Dyah yang ingin berontak berdasar pada hasrat yang dilontarkan Gilles Deleuze sebagai kritikan terhadap Freud, sebagai hasrat yang tidak terstruktur (Deleuze, 1972). Hasrat inilah yang mendorong pemberontakan I Gusti Agung Dyah terhadap tradisinya sebagai bentuk kebebasannya sebagai perempuan modern yang ingin menumbangkan tradisi yang sudah kusam oleh zaman. Di mana ada kekuasaan selalu ada perlawanan, bukan dalam arti kekuatan dari luar atau yang berlawanan, tetapi karena adanya kekuasaan itu sendiri (Haryatmoko, 2016: 13). Karena kekuasaan tidak berasal dari satu sumber, begitu pula perlawanan yang tidak datang dari satu sumber.

Perlawanan I Gusti Agung Dyah, yang bersumber dari pengetahuan dan kuasa dari lingkungan di luar tradisi kasta, atau tepatnya pendisiplinan yang lahir dari bangku pendidikan yang kemudian menjadi dasar dirinya membangun konter hegemoni tradisinya yang menggerakkan tubuhnya untuk memilih pendamping hidup berdasar kasta. Namun I Gusti Agung Dyah tidak sadar bangku pendidikan dengan berbagai prosedur membangun kebudayaan global terikat pada normalisasi dari kekuasaan berbeda. Yang mana adalah bentuk pendisiplinan dari relasi kuasa dan pengetahuan yang meneggerakannya untuk menolak tradisi kuno dalam bentuk penyeragaman budaya. Bentuk saling dominasi perlawanan dan kekuasaan ini melahirkan pertarungan sengit antara id dan superego. Id dalam hal ini yang mengikat Dyah dalam sejarah pembentukan epistem, aturan, penolakan tradisi sebagai dosa, yang juga bersinkronisasi dengan kehendak orang tua. Yang akan bertarung melawan superego yang mengikat kita dalam kehendak bebas dari bangku pendidikan dan di proses oleh ego sebagai respon kita yang akan mengarah pada penerimaan kebenaran tradisi yang ada dalam Id dikarenakan tradisi pemilihan pendamping hidup lebih mengakar lebih dekat dan lebih mudah, dibanding perlawanan yang didasarkan pendidikan yang melekat belakangan, dan pengalaman yang berada di luar dari lingkungan yang terlalu jauh dari habitus subyek. Karena sejarah merupakan muslihat nalar, maka kekuasaan konon merupakan muslihat sejarah, sebagai pihak yang selalu menang (Foucault, 1997). Maka dengan kuasa yang mendistribusikan doktrinasi dalam epistem sebagai sebuah sejarah dari pengalaman masa lalu, terbentuklah sebuah pemahaman yang mengakar dan terpatir dalam Id untuk diproses dan dilaksanakan sebagai pendisiplinan tubuh yang mengarahkan subyek untuk mengikuti tradisi memilih pendamping hidup sesuai dengan tradisi kastanya dikarenakan akan kepuasan di dalamnya.

Kekuasaan dan perlawanan yang saling mendominasi menjadi buah dari relasi kuasa dan pengetahuan, yang dialami I Gusti Agung Dyah dan Anak Agung Sri. Namun yang terpenting dalam proses ini adalah pembongkaran terhadap kebenaran-kebenaran mutlak, kebenaran yang sudah tidak sesuai dengan eranya, kebenaran yang menyiksa orang yang memproduksinya dan bermain dengan kuasanya. Bukan berarti menjadi hakim atas pendisiplinan tubuh oleh kuasa dan pengetahuan yang membentuk nilai dan moral dan membagi benar dan salah dalam logika biner. Melainkan menganalisa proses penaklukan tubuh kita yang terus berlanjut dan tidak terputuskan yang memaksa tubuh kita, memerintah bentuk perilaku kita, mendikte sikap-sikap kita, lebih dari sekedar menanyakan bagaimana kedaulatan (Foucault, 2002).

Mempertahankan Kapital Budaya, Melestarikan Budaya, dan Mempertahankan Kuasa

Modernisasi yang berjalan seiring dengan liberalisme, mengantarkan peradaban pada kebebasan berkehendak, memilih dan *equality*. Perubahan ini bukan hanya, mengakuisisi gaya pemikiran tradisional, namun juga membangun gerak kemajuan pada tahap berpikir yang lebih mapan. Cara berpikir inilah yang ikut mengarahkan pola pandang resistensi perempuan berkasta tinggi, pada tradisi pemilihan pendamping hidup yang ditentukan berdasar kasta. Mereka agak iri dengan perempuan berkasta rendah, yang tidak memiliki tradisi dan aturan yang mengikat untuk memilih pendamping hidup. Padahal perempuan berkasta tinggi memiliki kapital yang lebih dari perempuan berkasta rendah. Dengan kapital simbolis setiap perempuan berkasta tinggi memiliki gelar kerajaan. Dengan kapital sosial, perempuan berkasta tinggi mempunyai relasi hubungan struktur sosial yang memudahkan aksesnya terhadap masyarakat. Selain itu, perempuan berkasta tinggi pada umumnya memiliki kapital ekonomi, melalui peninggalan tanah keturunan sebagai warisan. Maka kepemilikan kapital berlebih yang dikonsepskan Bourdieu tidak menjamin kemerdekaan bagi mereka yang masih dalam arena kekuasaan tradisional.

Ini lah yang kemudian dilukiskan Mahatma Gandhi (2002:30) "*bahwa masyarakat hindu saat ini dapat dilukiskan sebagai masyarakat anarki; saat ini warna (kasta) tinggal nama... disini hanya ada satu warna apakah kaum perempuan atau pria: kita semua Shudra*". Di sini Gandhi dengan tegas menjelaskan perkawinan berdasar kasta, tidak lagi relevan di zaman kesadaran, karena perubahan kasta melalui status pernikahan perempuan adalah penghinaan secara langsung terhadap kelemahan seseorang yang terikat dengan kasta, dan berakibat langsung terhadap lembaga kasta yang tidak memberikan keadilan sosial. Namun perbedaan-perbedaan ini kemudian dipelihara para pemilik kasta tinggi khususnya dalam lingkaran keluarga darah biru saat ini sebagai langkah pembenaran misi mempertahankan dan melestarikan tradisi.

Namun memori realitas atas lahirnya kasta sebagai bentukan kolonialisme, memberikan gambaran bahwa kekuasaan dalam lingkaran keluarga berkasta tinggi malah mencoba mempertahankan budaya kolonial, budaya penjajahan, dan budaya kebodohan yang terstruktur. Disinilah letak konsep mimikri, yang merupakan proses kultural yang memberi peluang berlangsungnya agensi dari subjek kolonial untuk memasuki dominan sekaligus bermain-main di dalamnya dengan menunjukkan subjektivitas yang menyerupai penjajah tetapi tidak sepenuhnya sama (Bhabha, 1984: 126). Mimikri yang dilakukan keluarga berkasta tinggi di Bali nampak dengan menerima tradisi tersebut sebagai bentuk kamuflase yang digunakan sebagai jalan untuk bertahan dari dominasi, atau mereka menerima dengan *legowo* hal tersebut sebagai proses bertahan dari tekanan sosialnya yang melembagakan kasta.

Bentuk kekuasaan inilah yang Bourdieu konsepskan sebagai kekerasan simbolik.

Kekerasan yang tidak berjalan searah hanya dari pemilik kekuasaan, namun harus mendapat pengakuan atau penerimaan dari yang dikuasai. Perkawinan beda kasta adalah bentuk sempurna dari penerimaan dua arah lahirnya kekerasan simbolik, yang dinikmati kedua belah pihak, meskipun perempuan berkasta tinggi mendapat efek yang lebih besar, namun mereka menerima sebagai sesuatu yang alami. Habitus ini lahir dari kasualitas sebab akibat sistem sosial patriarki (Sanderson, 2010). Untuk itu hukuman perkawinan beda kasta yang secara tunggal hanya memberatkan perempuan berkasta tinggi menjadi suatu yang alami, walau dalam gambaran besarnya terdapat campur tangan kekuasaan.

Adapun realisasi hukuman tersebut, dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Perempuan berkasta tinggi yang menikah dengan kasta di bawahnya akan dihukum melalui pelucutan gelar kebangsawannya, yang otomatis menurunkan kastanya. Dengan tidak setaranya tingkatan kasta dengan keluarga yang ditinggalkan, maka putus pula hubungan keluarga, atau dikeluarkannya perempuan tersebut dari silsilah keluarga. Walau di kemudian hari terjadi perceraian antara kedua pihak yang menikah beda kasta ini, perempuan tidak dimungkinkan kembali kepada keluarga asalnya, yang menjadikan perempuan sebagai kasta buangan. Namun yang lebih parah dari hukuman tersebut adalah hukuman sosial, yang mana akan disematkan kepada keluarga yang kehilangan anak perempuannya. Berikut dikutip dari pernyataan I Gusti Agung Dyah :

“...namun untuk menuju tahapan selanjutnya (pernikahan dengan kasta rendah) saya masih pikirkan. Bukan karena saya takut dengan hukuman pengucilan dan pemutusan hubungan keluarga, namun saya tidak sampai hati melihat orang tua saya setelah saya tinggal mendapat cercaan dan tekanan dari keluarga lain karena dianggap gagal mendidik anak”

Disinilah ditemukan bagaimana dominasi kekuasaan yang terikat dalam aturan hukum lembaga kasta, tidak hanya menjadi mode pelestarian budaya, namun sebagai upaya kuasa dalam mempertahankan kekuasaan yang mengikat interaksi sosial masyarakat dalam sebuah lingkaran kekuasaan yang menormalisir melalui arena kekuasaan tradisional. Dengan penguasaan arena inilah maka kelompok dominan dapat menentukan mekanisme struktur yang *legitimate* serta membentuk sebuah hierarki kekuasaan dalam arena. Semakin otonom suatu mekanisme struktur, semakin mudah pula dominasi atas struktur tersebut dapat dicapai (Bourdieu, 1993). Sehingga dengan terhubungnya jaringan kepentingan untuk mempertahankan kapital budaya, melestarikan budaya, dan mempertahankan kuasa, terbentuklah sebuah mekanisme struktur yang mempertahankan kelembagaan kasta dan menindas agen-agen yang ada di dalamnya terkhusus perempuan berkasta tinggi.

“Tradisi pemilihan pasangan hidup pada perempuan berkasta tinggi memang adalah bentuk penindasan dan pengekanan dari budaya kami. Namun ada sisi sosial yang juga tidak bisa dilepaskan yang coba dipertahankan agar tidak tergerus era globalisasi,”

sesuai dengan kutipan Ida Bagus Gde Wira Wibawa sebagai tokoh budaya, penulis melihat adanya resistensi yang terkekang dan membentuk sebuah opini dilematis para pemuka budaya Bali melihat persoalan ini. Walau dalam penjelasan sebelumnya telah diterangkan yang terjadi di Bali, bukanlah pelestarian budaya tapi bentuk pemusatan kekuasaan melalui kekerasan simbolik, yang tidak memberikan keadilan sosial bagi perempuan berkasta tinggi. Hasilnya resistensi ini membentuk perempuan berkasta tinggi yang *well educated* menjalankan *mimikri* sebagai wujud ganda, dari perlawanan terhadap penindasan tradisi dan juga bertahan dari gerusan globalisasi. Dengan mengacaukan wacana dominan yang ada, maka wujud ganda *mimikri* ini membuat wacana dominan retak ambigu dan terbelah, dikarenakan ambivalensi yang terkandung dalam *mimikri* itu sendiri.

Efek lanjutan dari proses tersebut, adalah lahirnya budaya yang tidak otentik, atau

percampuran kebudayaan yang memaksa budaya dominan untuk bergeser dan disebut sebagai hibriditas. Hibriditas merupakan penilaian-ulang dari asumsi identitas terjajah melalui repetisi dari efek identitas diskriminatoris. Ia memamerkan deformasi dan penggantian penting dari semua situs diskriminasi dan dominasi. Ia mengganggu kebutuhan mimetik atau narsistik dari kekuasaan kolonial tetapi mengimplikasikan kembali identifikasinya dalam strategi subversif yang merubah pandangan dari yang terdiskriminasi kembali kepada mata kuasa. Karena hibrid-terjajah merupakan artikulasi dari ruang ambivalen di mana ritus kekuasaan dijalankan pada situs hasrat, menjadikan objeknya terdisiplinkan sekaligus melipat-gandakan diri...transparansi negatif (Bhabha, 1994: 112). Hibriditas inilah yang kemudian mengolah dua perbedaan tersebut dan meredakan ketegangan di dalamnya. Karena di ruang Hibriditas atau ruang ambang inilah kaum subaltern dalam hal ini perempuan berkasta tinggi, menemukan strategi perlawanan terhadap dominasi wacana dominan. Yang mana dalam proses awal dapat digerakan melalui pemudaran tanda-tanda, atau konversi kapital simbol menjadi kapital ekonomi dalam arena kekuasaan (Bourdieu, 1993). Sehingga pengambilan keputusan untuk memilih pendamping hidup yang mapan secara materi namun tidak memiliki kasta menjadi opsi baru. Negosiasi-negosiasi ini menjadi ruang ketiga yang akan menjadi langkah awal dari cara mengancam budaya dominan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perempuan adalah manusia merdeka yang memiliki hak yang sama seperti laki-laki dalam menentukan pilihannya untuk memilih pendamping hidupnya. Namun diskriminasi dari sistem tradisi kasta mengakibatkan mereka terbelenggu dalam menentukan pilihan tersebut, mereka harus dibenturkan oleh aturan-aturan yang seolah kebenaran yang akan menentukan kebahagiaan hidup mereka. Namun kebahagiaan yang coba digambarkan adalah kebahagiaan yang dimanipulasi kekuasaan, karena kebahagiaan yang ditanamkan dari kekerasan simbolik berakar dari kekuasaan dan pengetahuan. Pilihan hidup manusia memang tidak pernah lepas dari relasi pengetahuan dan kuasa yang mengarahkan kita pada pilihan yang kita anggap benar, namun secara tidak kasat mata kebenaran pilihan tersebut ternyata dikendalikan dalam kontrol kuasa. Maka hanya cinta yang dapat memerdekakan manusia dari belenggu kekuasaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies Theory and Practice*. California: Sage Publication Ltd.
- Bertens, Kees. 2006. *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bhabha, Homi K. 1984. "Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse", *Discipleship: A Special Issue on Psychoanalysis*, Vol. 28, hal. 125-133.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Bourdieu, Pierre. 1993. *The Field of Cultural Production*. New York: Columbia University Press.
- Bracher, Mark. 1997. *Jacques Lacan, Diskursus, dan Perubahan Sosial: Pengantar Kritik-Budaya Psikoanalisis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa. 1995. *Kebudayaan Bali*. Denpasar: Kayu mas Agung.

- Foucault, Michel. 1977. *Discipline And Punish: The Birth Of The Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel. 1980. *Power/Knowledge*. London: Travistock Publication Limited.
- Foucault, Michel. 1984. *The Foucault Reader*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel. 1997. *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris.
- Gandhi, Mahatma. 1970. *Woman and Social Injustice*. India: Publishing House.
- Goris, R. 1974. *Sekte-Sekte di Bali*. Jakarta: Bhratara.
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Karepun, Made Kembar. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta*. Denpasar: Panakom.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2004. *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuan*. Bogor: AkaDemia.
- Sanderson, Stephen K. 2010. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Spivak, Gayatri. C. 1994. "Can the subaltern speak?", dalam P. Williams & L. Chrisman (eds). *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory*. New York: Columbia University Press.

Internet

- Anonim, 15 Mei 2016. *Perkawinan Nyerod Dalam Hukum Adat (Dresta) Bali* <http://www.komangputra.com/perkawinan-nyerod-antar-beda-kasta-di-bali.html>. Diakses : 1 Desember 2018
- Setiawan, Ikhwan, 27 April 2015. Membaca Budaya bersama Bhabha: Ambivalensi, Hibriditas, dan Keliatan Kultural <http://ikwansetiawan.web.unej.ac.id/2015/04/27/membaca-budaya-bersama-bhabha-ambivalensi-hibriditas-dan-keliatan-kultural/>. Diakses : 1 Desember 2018